



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Depok Tahun 2020. Ringkasan LPPD ini disusun untuk memenuhi amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 69 yang mengacu pada PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

A. Capaian Makro Ekonomi

Pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kejadian pandemi Covid-19 dimana kasus pertama terjadi di Kota Depok pada Maret 2020. Pandemi ini sangat mempengaruhi kebijakan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian serta aspek social secara menyeluruh. Dampak dari pandemi, pemerintah daerah melakukan re-focusing atau penyesuaian belanja untuk pemenuhan pencegahan dan penanganan dampak covid-19. Selain itu terjadi penurunan pendapatan yang bersumber dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang juga berakibat pada perubahan anggaran secara umum. Perkembangan indikator kesejahteraan Kota Depok sampai dengan tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang baik, secara umum masih di atas rata-rata nasional dan Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari data pada tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya kecenderungan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data jumlah penganggur terbuka, angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat

sebagaimana terlihat pada tabel Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Aspek Makro berikut ini.

No	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Capaian Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	80,29	80,98	0,86
2	Angka Kemiskinan (%)	2,14	2,07	-3,27
3	Angka Pengangguran	6,64	6,11	-7,98
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,97	6,74	-3,30
5	Pendapatan per Kapita	3,49	3,35	-4,01
6	Ketimpangan Pendapatan	0,365	0,344	-5,75

Sumber Data : Badan Statistik Kota Depok Tahun 2020

Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Aspek Makro yang berpengaruh besar pada aspek kesejahteraan dimasyarakat, menunjukkan kecenderungan membaik pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,86 poin; Persentase angka kemiskinan menurun sebesar 3,27 dan angka pengangguran juga menurun sebesar 7,98. Sementara pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang dinilai sebagai indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, justru mengalami penurunan sebesar 3,30. Demikian halnya dengan Pendapatan per Kapita yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro juga mengalami penurunan sebesar 4,01. Sementara ketimpangan pendapatan sebagai salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk juga mengalami penurunan sebesar 5,75.

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang dimaksud dalam ringkasan capaian kinerja tersebut adalah pelayanan dasar pada urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan perumahan rakyat dan kawasan pekerjaan umum, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga urusan sosial. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pada masing-masing urusan pelayanan dasar dimaksud.

1. Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan terdapat capaian:

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian sebesar 38,237%, dimana dari 64.453 orang penduduk usia 5-6 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak 24.639 orang yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan capaian 108,17%, dimana dari 199.899 penduduk usia 7-12 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak 216.236 orang yang berpartisipasi dalam PAUD di Kota Depok.
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan capaian 75,03%, dimana dari 97.418 orang penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak 73.092 orang yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kota Depok.

- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian 13,99%, dimana dari 49.932 orang penduduk usia 7-18 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak 6.988 orang yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan capaian pada indikator tersebut tersebut, diketahui beberapa capaian yang belum optimal diantaranya capaian pada tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD capaiannya rendah dikarenakan sebagian besar warganegara yang berpartisipasi dalam PAUD merupakan usia 3-6 tahun. Demikian halnya dengan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, hal ini dapat disebabkan kurangnya informasi terhadap pendidikan kesetaraan yang sebenarnya menjadi salah satu indikator dalam pelayanan dasar di bidang pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Rasio daya tampung RS rujukan terhadap Jumlah Penduduk dengan capaian sebesar 0,013;
- b. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi dengan capaian sebesar 95,83%;
- c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian sebesar 92,68%;
- d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan capaian sebesar 90,81%;
- e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian sebesar 92,94%;
- f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan capaian sebesar 50,75%;
- g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 86,21%;
- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 29,30%;
- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 53,70%;
- j. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 20,50%;
- k. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 91,15%;
- l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan capaian sebesar 40,90%;
- m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan capaian sebesar 22,76%.

Beberapa indikator capaian pada urusan kesehatan masih belum optimal yaitu pada pelayanan kesehatan terhadap kelompok penduduk usia beresiko yaitu balita dan lanjut usia (usia 60 tahun ke atas), dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada pembatasan kegiatan terhadap kedua kelompok usia tersebut. Adapun pelayanan terhadap warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar juga mengalami pembatasan kegiatan *skrining* dan menurunnya jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Untuk pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) juga belum optimal dikarenakan pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik. Sementara

untuk pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat capaiannya juga rendah, karena disamping pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik juga kunjungan kesehatan jiwa selama pandemi menurun drastis dikarenakan pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas. Kondisi pandemi juga menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap orang terduga Tuberkulosis menjadi terbatas. Karena terbatasnya kegiatan *tracking* terhadap orang terduga Tuberkulosis. Selain itu juga disebabkan terbatasnya puskesmas yang belum terlatih metode DOTS dan terbatasnya RS yang juga belum menggunakan metode DOTS dan belum melaporkan menggunakan SITB.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada urusan Pekerjaan Umum terdapat capaian kinerja:

- a. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dengan capaian sebesar 81,13%;
- b. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian sebesar 4,06%;
- c. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian sebesar 98,56%;
- d. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota dengan capaian sebesar 100%;
- e. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota dengan capaian sebesar 94,47%
- f. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian sebesar 8,38%;
- g. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian sebesar 100%;

4. Urusan Perumahan Rakyat

Pada urusan Perumahan Rakyat terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 93,55%;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program dengan capaian sebesar 100%;
- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani dengan capaian 29,22%;
- d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan capaian 0,69%;
- e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan capaian 9,11%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat capaian:

- a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian sebesar 70,21%
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian sebesar 43,75%;
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 1.345 orang;
- d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 589 orang;
- e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 123 orang;
- f. Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran yaitu 06.20 detik.

6. Urusan sosial

Terdapat capaian kinerja yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) dengan capaian 87,73% dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

C. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan Tenaga Kerja terdapat capaian:

- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dengan capaian 100%;
- b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan capaian 37,87%
- c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian 1.115.961,3;
- d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan capaian 126,64%.
- e. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan capaian 56,96 %.

2. **Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat capaian:

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 103%;
- b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota sebesar 0,03%;
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 0,08%

3. Urusan Pangan, terkait dengan capaian Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) di Kota Depok yaitu sebanyak 0,018%.

4. Urusan Pertanahan

Terkait dengan pencapaian Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi masing-masing capaiannya 100%.

5. Lingkungan Hidup

Pada urusan Lingkungan Hidup terdapat capaian:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota IKA yaitu (Indeks Kualitas Air) = 4,34%, yaitu IKD (Indeks Kualitas Udara) = 65,76%, dan ITH (Indeks Tutupan Hutan) = 82,79%;
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota sebesar 68,09%;
- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kota sebesar 75,47%.

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, terkait dengan capaian sebagai berikut:

Perekaman KTP Elektronik sebesar 99,88%, Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sebesar 37,09%, Kepemilikan akta kelahiran sebesar 91,91%, dan

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebesar 31,57%

7. **Urusan** Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terkait dengan capaian TFR (Angka Kelahiran Total) sebesar 2,069 dan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) sebesar 74,74%.
8. **Urusan** Perhubungan, terkait dengan capaian Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota sebesar 0,88 dan V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota sebesar 0,82.
9. **Urusan** Komunikasi, Statistik dan Persandaiian
 - a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebesar 100%;
 - b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras sebesar 96%;
 - c. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui sebesar 70,89%.
10. **Urusan Statistik**

Terkait dengan capaian Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah masing-masing capaiannya 100%.
11. **Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha masing-masing capaiannya 34,67% dan 48,33%
12. **Urusan** Penanaman Modal Provinsi
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota menunjukkan tren penurunan sebesar 5,57 %.
13. **Urusan** Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaian 2,93%;
 - b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian 0,51%;
 - c. Peningkatan prestasi olahraga melalui perolehan 12 medali.
14. **Urusan** Kebudayaan
Terkait dengan capaian Terlestarikannya Cagar Budaya dengan capaian 66,67%.
15. **Urusan** Perpustakaan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan capaian sebesar 57,23%.
16. **Urusan** Kearsipan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan capaiannya 50%.
17. **Urusan** Kelautan dan Perikanan
Terkait dengan capaian Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) sebanyak 47.573.869 ton .

18. Urusan Pariwisata
 - a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan menurun sebesar 0,31%
 - b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota menurun sebesar 60%
 - c. Tingkat hunian akomodasi sebesar 26.77%
 - d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sebesar 4,09%
 - e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebanyak Rp. 11.000.000.
19. Urusan Pertanian
Terkait capaian Produktivitas pertanian per hektar per tahun dan Persentase Penurunan Kejadian sebanyak 6,52 Ton/Ha dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular menurun sebesar 0,285%.
20. Urusan Perdagangan
Terkait dengan capaian Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 93,96%, Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 67,27%, dan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku sebesar 12,84%.
21. Urusan Perindustrian
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota sebesar 50,36 dan Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) sebesar 50,36%.

D. Ringkasan Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Dan Keuangan
 - a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan sebesar 29.34%
 - b. Rasio PAD sebesar 2,475.
 - c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3
 - d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 Integrated
 - e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) sebesar 0,00%.
2. Pengadaan
Terdiri dari capaian Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif sebesar 6,05% dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan sebesar 26,89%. Sementara Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama sebesar 0%.
3. Kepegawaian
Terdiri dari capaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 587,40%, Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 9,33%, dan Rasio Jabatan Fungsional bersertifikasi kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 100%.
4. Manajemen Keuangan
Terdiri dari capaian Budget execution yaitu Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD sebesar 13%, Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD sebesar 6%, terlaksananya Assets Management, dan Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya sebesar 14.32%.
5. Transparansi dan Partisipasi Publik
Terkait dengan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dengan capaian 107,07% dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*) sebesar 58,33%.

E. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Depok memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Tahun 2019. Perolehan WTP tersebut merupakan yang kesembilan kali secara berturut-turut. Penilaian atas LDKP dari BPK ini menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintahan daerah, serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKDP. Tahun Anggaran 2019.

F. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) An Audited Tahun Anggaran 2020 diketahui Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah pada penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 670.655.917.064,55 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 670.655.917.064,55. Sementara untuk Jumlah pembiayaan pengeluaran pada penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp.74.094.500.000,00 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.094.500.000,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi baik pada penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2020 capaiannya adalah 100%.

F. Inovasi Daerah

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Depok telah melakukan inventarisasi data indeks inovasi daerah yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan produk, layanan, dan sistem yang berguna untuk meningkatkan kualitas atau nilai tambah produk yaitu:

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Inisiator	Urusan Pemerintah
1	Inovasi Daerah Pencegahan COVID-19 pada sektor pasar tradisional (Inovasi Belanja Sehat di Kota Depok)	Inovasi pelayanan publik	ASN	kesehatan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan
2	Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 pada sektor PTSP (<i>One Hours Service</i>)	Inovasi pelayanan publik	OPD	penanaman modal
3	Sistem Aplikasi Perlindungan Anak/ Web KLA (SAPA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	OPD	sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Sekolah Ayah Bunda	dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	OPD	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Inisiator	Urusan Pemerintah
5	JOTRAM: <i>Joyful Traffic Management</i> (Model Pengelolaan Kemacetan Lalu Lintas yang berorientasi customer di Jalan Margonda Raya)	Inovasi pelayanan publik	ASN	sosial,perhubungan,Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Sekolah Pra Nikah	Inovasi pelayanan publik	OPD	pengendalian penduduk dan keluarga berencana
7	Aplikasi Kinerja Mobile (KMob Depok)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	OPD	Kepegawaian
8	Sistem Informasi Management Terintegrasi Penerangan Jalan Umum (Smart PJU)	Inovasi pelayanan publik	ASN	pekerjaan umum dan penataan ruang,perhubungan
9	Sistem Otomasi Perpustakaan (Integrated Library System "inlisLite")	Inovasi pelayanan publik	OPD	perpustakaan
10	e-Perpus Kota Depok	Inovasi pelayanan publik	OPD	perpustakaan

G. PENUTUP

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Kota Depok 2016-2021 yaitu mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius, Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Keberhasilan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, tidak lepas dari peran dan partisipasi pemerintah, stakeholder dan masyarakat, baik sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Depok Tahun 2020. Pada kesempatan ini, Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Masyarakat Kota Depok, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Depok. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2020 ini terdapat kekurangan. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan pertolongan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

WALI KOTA DEPOK

Dr. KH. MOHAMMAD IDRIS, MA

